

Prosedur Sanksi Ekonomi Britania Raya terhadap Rusia: Studi Kasus Konflik Rusia-Ukraina 2022

Ananda Putra Fiksis

*Program Studi Hubungan Internasional
UPN "Veteran" Jawa Timur*

email: fiksis900@gmail.com

ABSTRACT

The issue of the outbreak of war in Europe, especially the one between Russia and Ukraine in 2022, is one of the conflicts that creates many policies that come from other countries. One of the countries that responded to this conflict was the United Kingdom. The United Kingdom issued a policy of economic sanctions against Russia as an act of defending Ukraine, which has the right to freedom and sovereignty of its country. Based on this fact, the authors are compelled to conduct research on the procedures used by the United Kingdom in implementing its economic sanctions, especially on issues concerning Chelsea Football Club which is owned by a Russian entity. With a period of 2018-2022, this study uses a qualitative descriptive method with secondary data analysis. In this study, the procedure will be dissected through theories of international relations such as the theory of coercive diplomacy by Constantinou, et al. (2016) and the theory of economic sanctions by Filipenko, et al. (2020). The results of this study include, among others, that the United Kingdom provides economic sanctions through several stages, namely the declaration of coercive diplomacy as a policy basis, the use of special laws as the basis for economic sanctions, asset freezing and cessation of forced investment.

Keywords: *Coercive Diplomacy, Economic Sanctions, United Kingdom, Russia*

Isu pecahnya peperangan di wilayah Eropa khususnya yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022 merupakan salah satu konflik yang menciptakan banyak kebijakan yang hadir dari negara-negara lainnya. Salah satu negara yang merespon konflik ini ialah Britania Raya. Britania Raya mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi kepada Rusia sebagai tindakan membela Ukraina yang berhak atas kebebasan serta kedaulatan negaranya. Berdasarkan fakta ini, penulis terdorong untuk membuat penelitian tentang bagaimana prosedur yang digunakan Britania Raya dalam mengimplementasikan sanksi ekonominya khususnya pada isu yang menyangkut Chelsea Football Club yang dimiliki oleh entitas Rusia. Dengan jangka waktu 2018-2022, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder. Pada penelitian ini prosedur akan dibedah melalui teori-teori hubungan internasional seperti teori diplomasi koersif oleh Constantinou, dkk. (2016) dan teori sanksi ekonomi oleh Filipenko, dkk. (2020). Hasil dari penelitian ini antara lain, Britania Raya memberikan sanksi ekonomi melalui beberapa tahapan yakni penancangan diplomasi koersif sebagai landasan kebijakan, penggunaan hukum khusus sebagai pondasi sanksi ekonomi, pembekuan aset dan penghentian investasi paksa.

Kata Kunci: *Diplomasi Koersif, Sanksi Ekonomi, Britania Raya, Rusia*

Pendahuluan

Secara mendasar, sistem internasional memiliki beberapa aktor yang dibagi menjadi dua jenis yakni aktor negara dan non-negara (organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu) (Kan 2011). Salah satu peristiwa yang sering kali terjadi adalah tidak terjalannya kerja sama dengan berbagai macam latar belakang alasan yang berlanjut hingga muncul gejolak-gejolak konflik antar aktor. Dalam studi hubungan internasional, tentu hal tersebut sangat wajar terjadi karena tidak semua aktor memiliki pemahaman yang

sama tentang suatu hal. Salah satu konflik yang banyak dibahas dalam studi hubungan internasional adalah konflik antara Rusia dan Ukraina. Apabila dilihat dari sisi sejarahnya Ukraina merupakan negara bekas bagian Uni Soviet pada masa sebelum perang dingin yang kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1991. Dari peristiwa perpecahan Uni Soviet dan keputusan untuk merdeka inilah yang menyebabkan unsur politik di Ukraina kurang memiliki unsur stabilitas. Kondisi politik di Ukraina banyak terganggu dengan ideologi-ideologi Pro-Rusia yang terbentur dengan nasionalisme Ukraina yang menyebabkan timbulnya perbedaan di tengah-tengah masyarakatnya (Agnieszka Pikulicka-Wilczewska 2015). Kondisi ini terus terjadi hingga banyak konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, salah satunya yang terjadi pada tahun 2015 ketika Rusia merebut Krimea dari Ukraina (Fitzgerald 2022).

Peristiwa yang terjadi pada tahun 2015 tersebut terulang dengan skala konflik yang lebih besar pada awal tahun 2022. Tepatnya pada 24 Februari 2022, Rusia dengan dikomando langsung oleh presidennya yakni Vladimir Putin melancarkan agresi militer kepada Ukraina sebagai ujung dari permasalahan-permasalahan antara Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung terselesaikan (Fitzgerald 2022). Sejatinya, Presiden Putin tidak mendefinisikan kebijakannya sebagai langkah menginvasi Ukraina akan tetapi disebutnya sebagai operasi militer khusus untuk demiliterisasi Ukraina yang mengancam Rusia serta misi pemberantasan nazism (Bloomberg 2022). Permasalahan-permasalahan di antaranya adalah menyangkut isu geopolitik kedua negara dan ditambah juga dengan isu lawas mengenai ideologi yang dibawa oleh Amerika Serikat dalam The North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang bukan merupakan aliansi Rusia.

Dengan hadirnya kecaman negara-negara lain atas tindakan Rusia tersebut, konflik yang hanya terjadi antar dua negara menjadi meluas dengan tambahan-tambahan dukungan untuk kedua belah pihak yang berkonflik dan juga isu yang menjalar ke aspek-aspek lain seperti pada sektor ekonomi. Aktivitas bilateral yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina dianggap melanggar hukum internasional oleh banyak negara seperti Amerika Serikat dan Britania Raya. Keduanya juga merupakan aliansi dalam berbagai kepentingan yang salah satunya penguatan ekonomi dan keamanan negara. AS dan Britania Raya juga memiliki perencanaan untuk merespon tindakan Rusia dari sektor non-militer, salah satunya adalah menghentikan sumber pendanaan kebijakan operasi militer khusus. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sanksi ekonomi yang dapat mengurangi sumber pendapatan negara untuk membiayai militer serta bertujuan untuk menggoyahkan kondisi ekonomi Rusia yang selanjutnya diharapkan berbuah perdamaian. Sanksi ekonomi ini akan menjaring banyak entitas Rusia yang memiliki aset di Britania Raya, salah satunya adalah Roman Abramovich. Abramovich merupakan pemilik resmi salah satu klub sepak bola nasional Inggris yakni Chelsea Football Club (Government UK 2022). Dengan demikian konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina memiliki hubungan secara langsung dengan jalannya kegiatan operasional *brand global* Chelsea FC.

Dari latar belakang yang menjelaskan mengenai banyaknya respon negatif dari banyak negara atas tindakan Rusia, muncul pertanyaan ilmiah: Bagaimana prosedur pemberian sanksi ekonomi Britania Raya terhadap Rusia pada isu konflik Rusia-Ukraina tahun 2022? Dengan demikian, pada penelitian ini penulis mencoba untuk membahas lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan yang digunakan Britania Raya dalam memberikan sanksi kepada Rusia khususnya pada kasus yang menyertakan Chelsea Football Club dengan jangkauan waktu 2018 – 2022. Penelitian ini juga akan merinci hukum-hukum domestik dan internasional yang digunakan oleh Britania Raya yang nantinya akan berhubungan langsung dengan sanksi ekonomi Rusia.

Metodologi

Untuk mengetahui prosedur yang digunakan Britania Raya dalam memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia dengan studi kasus Chelsea FC, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tulisan ini akan menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori diplomasi koersif oleh Perez (2015) dan teori sanksi ekonomi yang ditulis oleh Filipenko, Bazhenova dan Stakanov (2020). Menurut Constantinou, Kerr & Sharp (2016), diplomasi merupakan salah satu instrumen atau media yang digunakan suatu negara untuk menggapai tujuan-tujuan nasional maupun internasionalnya. Dalam diplomasi sendiri terpecah menjadi banyak jenis, yang mana dipecahan-pecahan tersebut terdapat ciri khas dan tujuan masing-masing yang unik. Salah satunya yakni diplomasi koersif atau *coercive diplomacy*, yang mana merupakan jenis diplomasi yang cukup familiar di kalangan peneliti hubungan internasional.

Seperti yang diketahui dalam hubungan internasional, diplomasi memiliki banyak jenis yang nantinya dapat dipilih yang mana yang paling sesuai untuk menggapai cita-cita atau tujuan nasional. Secara konsep, pada dasarnya diplomasi koersif memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan aspek militer. Dikatakan demikian dengan alasan bahwa penggunaan militer dalam aktivitas diplomasi koersif, seperti halnya proses negosiasi ataupun pemberian tekanan terhadap pihak yang dituju (Constantinou, Kerr, & Sharp, 2016). Meskipun berkuat dalam sifat-sifat yang mengancam serta menekan, diplomasi koersif tetap memiliki persamaan dengan diplomasi-diplomasi lain sebagai alat negara yakni diutamakan jalur negosiasi hingga pada akhirnya dapat menyentuh kesepakatan untuk bekerja sama.

Menurut argumen Peter Viggo Jakobsen (2016) yang dimuat dalam *The Handbook of Diplomacy*, diplomasi koersif memiliki formulasi yang berbanding terbalik dengan *blackmail* yang dibuat untuk menginisiasi aksi targetnya. Berbeda dengan *blackmail*, diplomasi koersif memiliki dua tujuan utama yakni untuk menghentikan atau membatalkan tindakan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh negara target. Dalam studi hubungan internasional, diplomasi koersif juga mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. Salah satunya adalah dengan mengkolaborasikan aspek lain dalam suatu struktur negara ataupun sistem internasional demi peningkatan efektifitas kebijakan koersif.

Perez (2015) memberikan pandangan yang baru mengenai diplomasi koersif. Dalam penelitiannya diplomasi koersif dapat disandingkan dengan kebijakan ekonomi yang selanjutnya membuat diplomasi koersif memiliki sifat multi aspek. Masuknya multi-aspek ini dikarenakan dibutuhkan penajagan terhadap konfrontasi diplomatik khususnya dalam ancaman perang. Dengan demikian, dalam situasi krisis dibutuhkan pembuatan kebijakan ekonomi yang dapat memformulasikan strategi untuk manajemen dan menghentikan krisis tersebut tanpa adanya erupsi konflik kekerasan ataupun peperangan (Perez 2015). Perez dalam bukunya yang berjudul *Coercive Diplomacy in the 21st Century: A New Framework for the "Carrot and Stick"* juga mengidentifikasi diplomasi koersif sebagai langkah yang relevan bagi negara yang memiliki pengaruh besar dan dapat merubah arah kebijakan negara targetnya.

Perez (2015) menyebutkan bahwa diplomasi koersif terdapat empat variabel utama yang terlibat diantaranya yakni (a) *the demand*, atau permintaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk menghadapi negara targetnya; (b) *the means used for creating a sense of urgency*; (c) *the threatened punishment for noncompliance*, dengan kata lain negara juga harus mempersiapkan hukuman untuk negara target apabila tidak memenuhi permintaannya; dan (d) *the possible use of incentives*. Selain itu, Perez (2015) berasumsi bahwa diplomasi koersif memiliki beberapa jenis yang memiliki ciri khas masing-masing seperti ultimatum, *tacit ultimatum*, *"try and see" approach*, *gradual timing of the screw*, dan *carrot and stick approach*. Dibedakannya jenis-jenis diplomasi koersif menjadi lima tipe tersebut berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh negara dalam melancarkan diplomasi koersifnya ke negara lain.

Tipe yang pertama yakni Ultimatum yang berisikan permintaan atau demand, diikuti dengan pembatasan waktu untuk negara target merespon permintaan tersebut dan dilengkapi juga dengan ancaman hukuman yang kuat dan kredibel untuk ketidakpatuhan. Dalam tipe ini, penekanan koersif sangat ditekankan melalui coercion atau paksaan terhadap negara target agar mengikuti demand yang dikeluarkan sebelumnya. Strategi *full fledged* ultimatum ini sangat relevan dengan fungsi diplomasi koersif yang diluncurkan oleh negara-negara bersifat paten terhadap kebijakannya, dengan kata lain tidak ada fleksibilitas atau negosiasi kembali mengenai keputusan awal. Kemudian tacit ultimatum merupakan versi lebih ringan dari ultimatum yakni lebih banyak strategi yang dilakukan secara implisit dan bukan eksplisit. Yang ketiga yakni *try & see*, dimana tidak ada pembatasan waktu dari pelimpahan permintaan kepada negara target. *Gradual turning of the screw*, merupakan strategi yang melibatkan ancaman peningkatan tekanan koersif dengan waktu yang lebih lama dari strategi diplomasi koersif ultimatum. Dan yang terakhir adalah *carrot & stick approach*, pendekatan ini juga dipopulerkan oleh Alexander L. George namun telah banyak diperbarui oleh banyak peneliti hubungan internasional dan dinilai sebagai strategi dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi terlebih jika konsepsi *carrot* lebih tinggi dibandingkan pendekatan *stick* (Perez 2015). Secara harfiah, wortel dan tongkat merupakan perumpamaan kebijakan bilateral ataupun multilateral yang digunakan untuk melambungkan *prize* dan *punishment*. Konsep ini berawal dari teori motivasi tradisional, yang menekankan bahwa hanya ada dua pilihan bagi penerima *carrot & stick* yakni hadiah atau hukuman. Apabila dibawa ke diplomasi koersif hal ini sama seperti pendekatan ultimatum akan tetapi ditambahi dengan instrumen *reward*.

Dengan masuknya aspek ekonomi dalam diplomasi koersif dibutuhkan kebijakan yang dapat mewartakan hal tersebut. Perez (2015) mengemukakan salah satu bentuk kebijakan yang dapat dimasukkan dalam upaya negara melakukan langkah diplomasi koersif yakni sanksi ekonomi atau embargo. Sanksi ekonomi dalam diplomasi koersif diyakini merupakan salah satu jalan untuk memperlancar usaha negara membujuk targetnya menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar yurisdiksi maupun hukum internasional atau membatalkan kebijakan yang sudah dilakukan. Harapan dari dilakukannya sanksi ekonomi tentunya terbentuk resolusi perdamaian, meskipun dengan cara yang koersif. Untuk memperjelas mengenai kebijakan sanksi ekonomi, penulis telah merangkum teori-teori mengenai sanksi ekonomi guna menjelaskan secara merinci mengenai apa, mengapa dan bagaimana sanksi ekonomi digunakan.

Untuk merealisasikan diplomasi koersif ke bentuk yang nyata dan dapat secara langsung menekan negara target dibutuhkan kebijakan koersif yang juga dapat mengimplementasikan sifat multi aspek diplomasi koersif. Maka dari itu penulis menggunakan teori kedua yang merupakan bagian dari diplomasi koersif yakni teori sanksi ekonomi yang ditulis oleh Filipenko, Bazhenova, et al (2020). Seperti yang kita ketahui setiap negara yang telah memiliki tujuan nasional harus memiliki kebijakan yang merepresentasikan tujuannya, begitu juga dengan negara-negara koersif. Sanksi ekonomi merupakan salah satu terobosan kebijakan untuk berbagai tujuan salah satunya adalah untuk merespon suatu konflik (Filipenko, Bazhenova, et al 2020). Sanksi ekonomi juga dinilai sebagai salah satu *foreign economic policy* yang bersifat anti-tesis kebijakan ekonomi secara umum.

Teori sanksi ekonomi mengharuskan adanya keterlibatan minimal dua aktor, dimana satu diantaranya akan menjadi negara pencetus sanksi atau negara *sender* dan satu yang lainnya akan menjadi negara yang dikenai sanksi atau negara *target* (Filipenko, Bazhenova, et al 2020). Kobayashi (2018) menambahkan, selain aktor indikator lain yang membangun teori sanksi ekonomi adalah kebijakan tersebut harus memiliki permintaan yang konkrit dimana juga akan merealisasikan cita-cita yang diinginkan. Permintaan tersebut nantinya yang akan menyebabkan perubahan tindakan yang diambil oleh negara target (Kobayashi 2018).

Dalam hal ini permintaan perubahan kebijakan dapat berasal dari berbagai macam aspek seperti perubahan dalam kebijakan perdagangan, isu lingkungan, kebijakan yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM), dan tentunya mencegah tindakan militer negara target.

Kebijakan sanksi ekonomi pada dasarnya dapat dilihat dari dua perspektif yang saling berbeda, seperti liberalisme dan realisme. Pada perbedaan tersebut, kebijakan sanksi ekonomi dapat dibagi menjadi dua tipe yakni (a) kebijakan yang bertujuan mengetatkan dan penataan sebagai bentuk pengaplikasian penegakkan hukum internasional dalam lingkup ekonomi dan (b) kebijakan yang dirumuskan berdasarkan interpretasi situasi politik dan ekonomi (Filipenko, Bazhenova, et al 2020). Dari tipe utama tersebut, Filipenko dkk. juga beragumen bahwa terdapat tiga jenis kebijakan untuk memberikan sanksi ekonomi ke negara lain, di antaranya yakni perdagangan, investasi atau finansial dan sanksi yang ditargetkan atau banyak yang menyebutnya smart sanctions (Filipenko, Bazhenova, et al 2020). Untuk lebih mudah memahaminya terdapat tabel yang dituliskan oleh Filipenko dkk. mengenai tipe sanksi ekonomi:

Tabel 1 Tipe Sanksi Ekonomi

POSITIVE SANCTIONS	NEGATIVE SANCTIONS
Existing or promised gains	Existing or threatening penalties
<u>Trade sanctions:</u> – Tariff reduction – Tariff elimination	– Partial embargo – Absolute embargo
<u>Investment or financial sanctions:</u> – Financial or investment assistance from various institutions such as the IMF, the WB or from countries	– Reduction of capital flows (lending reduction or suspension) – Forced disinvestment – Reduction in international payments – Assets freezing
<u>Targeted sanctions:</u> – Humanitarian aid	– Transport and communications ban – Travel ban – technology transfer ban, IPR transfer ban

Sumber: Filipenko, et al. (2020)

Melalui tipe-tipe sanksi tersebut penulis menggunakan dua tipe sanksi ekonomi yang dapat mendeskripsikan studi kasus pada penelitian ini. Keduanya adalah *assets freezing* dan *forced disinvestment*. Secara teori, *assets freezing* atau pembekuan aset berhubungan dengan investasi seperti *outward FDI*. Menurut The World Bank (2022), *Outward FDI* merupakan FDI yang diluncurkan suatu negara (dengan medium yang berbeda-beda) termasuk dalam bentuk aset dan liabilities yang dibeli untuk keperluan investasi atau menghasilkan pemasukan untuk investornya. Objektif pembekuan aset tersebut bertujuan untuk menghalau individu, kelompok atau entitas dari pendanaan guna mendukung kebijakan atau tindakan yang melanggar hukum internasional (UNSC, 2015).

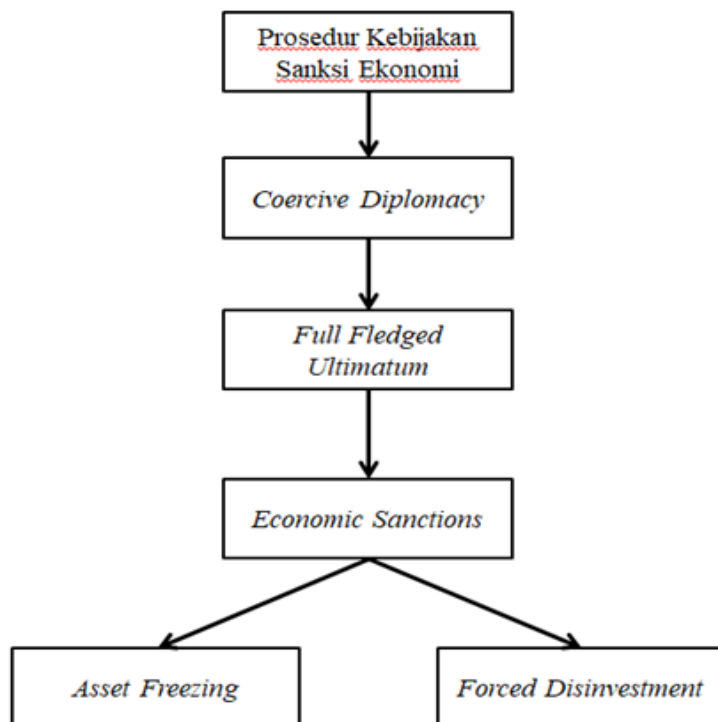
Kemudian yang kedua yakni *forced disinvestment* atau penarikan investasi secara paksa oleh pihak di luar investor. Secara definisi, *forced disinvestment* tentunya berbanding terbalik dengan kata investasi atau tindakan FDI. Terdapat dua tahapan utama dalam menjalankan kebijakan penghentian investasi paksa diantaranya adalah pemberitahuan dan eksekusi. Pada fase pertama, pemberitahuan investor akan dibagi menjadi lima macam yakni (1) *Announcements of nationalization*; (2) *Announcements of expropriation*; (3)

Occupations; (4) *Threats to expropriate or nationalize*; (5) *Transitory revocation of permit* (Ochoa dan Pena, 2020). Kelimanya diartikan memiliki penanganan yang berbeda-beda seperti nasionalisasi perusahaan (terdapat proses jual beli), pengambil-alihan perusahaan (kemungkinan besar tanpa kompensasi), intervensi bisnis oleh negara host, ancaman nasionalisasi atau ambil alih, dan pencabutan izin perusahaan.

Kemudian pada eksekusi, menurut Ochoa dan Pena (2020) negara akan melakukan paling tidak dua tipe tindakan diantaranya (a) penjualan paksa (*forced sales*) dan (b) penyitaan aset (*asset seizures*). Pada penjualan paksa, umumnya negara host akan mengeluarkan publikasi dalam bentuk perjanjian dengan pihak perusahaan atau investor. Kemudian terdapat langkah kedua yakni penyitaan aset atau *asset seizures*, yang mana terdapat keputusan unilateral dari negara host untuk mengambil kontrol penuh atas produk investasi yang ada tanpa adanya kompensasi kepada investor. Dalam penyitaan ini terbagi menjadi dua jenis yakni: (1) *Outright expropriations*, dalam kasus ini pemerintah akan menyita aset tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Akan tetapi dalam model ini, pihak perusahaan dapat meminta kompensasi melalui langkah hukum di pengadilan atau litigasi; dan (2) *Permanent revocation of permits*, dalam kasus ini perusahaan akan mendapatkan *license* untuk melanjutkan pengoperasian perusahaan dalam batas waktu tertentu. Namun, kepemilikan akan tetap diambil alih oleh pemerintah setempat.

Setelah memahami kedua teori di atas, penulis beragumen bahwa prosedur yang diambil oleh Britania Raya dalam sanksi ekonominya adalah (1) pemberian ultimatum sebagai jalan diplomasi koersif; (2) penggunaan *full fledged ultimatum* sebagai titik dimulainya sanksi ekonomi; (3) pemberlakuan sanksi ekonomi yang dibagi menjadi pembekuan aset dan penghentian investasi secara paksa melalui penyitaan aset yang kemudian berlanjut ke penjualan paksa. Dengan begitu, sintesa pemikiran dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 1 Sintesa Pemikiran
Diplomasi Koersif dan *The Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018***



Prosedur pertama yang dijalankan oleh Britania Raya adalah menetapkan bagaimana tujuan-tujuan keamanan yang ingin dicapai. Pada laman resmi Pemerintah Britania Raya, pernyataan mengenai pendirian Britania Raya untuk terus mewujudkan perdamaian dunia yang salah satunya juga diperjuangkan oleh Ukraina yang merupakan negara satu regional (Government UK 2022). Hal ini merupakan salah satu bentuk *national security goals* yang ingin dicapai Britania Raya. Pembuktian bahwa ketidaksetujuan Pemerintah Britania Raya juga ditunjukkan secara langsung oleh Perdana Menteri Boris Johnson yang berpidato pada tanggal 10 Februari 2022:

"This is probably the most dangerous moment, I would say, in the course of the next few days, in what is the biggest security crisis that Europe has faced for decades, and we've got to get it right. And I think that the combination of sanctions and military resolve, plus diplomacy are what is in order." (PM Johnson, RFE/RL 2022)

Pernyataan tersebut merupakan satu dari sekian banyak ultimatum yang disampaikan Pemerintah Britania Raya yang diantaranya ada yang disampaikan sebelumnya pada 13 Desember 2021 ketika militer Rusia mulai bersiaga diperbatasan Ukraina yang menyebabkan *security dilemma* bagi Ukraina, NATO maupun negara di Benua Eropa lainnya. Ultimatum-ultimatum yang ditujukan kepada Rusia juga disampaikan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Liz Truss pada beberapa kesempatan, salah satunya ketika diskusi parlemen PBB tepatnya pada United Nation Security Council (UNSC) 6 Januari 2022 (Government UK 2022). Pada kesempatan tersebut, Britania Raya menegaskan bahwa akan ada hukuman yang masif bagi Rusia apabila terus melakukan tekanan dan ancaman kepada Ukraina, salah satunya telah dipersiapkan dengan aliansi yang telah dibuat dengan nama *Network of Liberty*.

Penulis menilai ultimatum-ultimatum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Britania Raya memiliki karakteristik yang sama dengan salah satu indikator diplomasi koersif yakni *tacit ultimatum*. Pada ultimatum tersebut berisikan permintaan dan hukuman yang akan dikeluarkan untuk Rusia apabila terus melakukan tindakan agresifnya. Akan tetapi dari rentetan *tacit ultimatum* tersebut belum diluncurkan kebijakan yang mengikat Rusia hingga pada tanggal 24 Februari 2022. Pada tanggal tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi memulai operasi militer khususnya terhadap Ukraina yang bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan militer Ukraina. Dimulainya operasi militer tersebut juga membangunkan para aliansi Ukraina diantaranya seperti Britania Raya dan Amerika Serikat serta negara-negara anggota NATO lainnya. Britania Raya memulai dengan mengeluarkan *full fledged ultimatum* ditandai dengan pidato resmi PM Johnson yang memberikan sanksi ekonomi masif kepada Rusia dengan permintaan menghentikan operasi militernya dan akan menambah skala sanksi apabila Rusia tidak menepati permintaan Britania Raya.

Full fledged ultimatum Britania Raya ini tidak seketika berdiri, pada tatanan hukum domestiknya Britania Raya telah membentuk pondasi sanksi ekonomi yang berisikan rincian serta deskripsi sanksi ekonomi yang dijalankan oleh Britania Raya. Hukum tersebut bernama *The Sanctions and Anti-Money Laundering Act* (SAML) 2018. Pembentukan ini bertujuan untuk memperkuat pondasi kebijakan sanksi ekonomi kepada negara lain oleh Britania Raya dan juga sebagai alternatif hukum setelah brexit yang menyebabkan tidak digunakannya tatanan hukum European Union tepatnya *The European Communities Act* 1972 (Legislation UK 2022). Selain sanksi ekonomi, SAML 2018 juga menyediakan hukuman bagi pelaku tindakan pencucian uang untuk pendanaan suatu rezim yang melanggar hukum internasional. Kedua aspek yang ada di SAML 2018 merupakan hasil amandemen beberapa hukum domestik diantaranya yakni (a) *The Immigration Act* 1971; (b) *The Senior Courts Act* 1981; (c) *The Regulation of Investigatory Powers Act* 2000; (d) *The Serious Organised Crime and Police Act* 2005; (e) *The Serious Crime Act* 2007; (f) *The*

Crime and Courts Act 2013; (g) *The Investigatory Powers Act 2016*; dan (h) *The Policing and Crime Act 2017* (Government UK 2018).

Dengan demikian Britania Raya memiliki *national security tools* yang terbagi menjadi tiga bagian dan tiga *schedules* diantaranya (i) regulasi sanksi; (ii) anti pencucian uang; dan (iii) penjelasan umum, serta dalam *schedules* berisikan (a) sanksi perdagangan; (b) pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan (c) amandemen konsekuensial (Legislation UK 2022). Sebagai tatanan hukum yang resmi digunakan pada 13 Desember 2021, SAMLA 2018 memiliki tujuan yang konkrit diantaranya yakni (1) memungkinkan Britania Raya untuk terus menerapkan rezim sanksi PBB dan menggunakan sanksi untuk memenuhi tujuan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri dan (2) memungkinkan tindakan anti-pencucian uang dan pendanaan kontra-teroris untuk terus diperbarui, membantu melindungi keamanan dan kemakmuran Britania Raya dan terus menyelaraskan dengan standar internasional (Government UK 2022).

Bentuk bantuan Britania Raya juga hadir dalam aspek kemanusiaan yang juga memiliki pondasi diplomasi koersif yakni dengan meluncurkan kampanye yang juga meliputi media daring. Britania Raya meluncurkan website dengan nama “*ukstandswithukraine.campaign.gov.uk*” yang merupakan lama resmi penggalangan dana bagi masyarakat Ukraina yang dibuka untuk seluruh penduduk yang ingin membantu (Government UK 2022). Melalui laman tersebut juga Britania Raya meningkatkan ketersediaan informasi atas invasi yang dilakukan oleh Rusia, khususnya dampak-dampka yang disebabkan oleh operasi militer Rusia. Dengan demikian diplomasi koersif Britania Raya dapat menyebarkan bagaimana konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya invasi.

Selain itu diplomasi koersif Britania Raya juga tetap memiliki aspek militer, dimana Pemerintah Britania Raya memberikan bantuan berupa ribuan senjata anti-tank, anti-misil, roket, kendaraan bersenjata, artileri, senjata kecil, amunisi, dan bantuan non-persenjataan seperti helm, pelindung badan, dan alat-alat medis. Pada tanggal 17 Juni 2022, Presiden Johnson juga menambahkan pelatihan militer Britania Raya khusus untuk membantu militer Ukraina (Government UK 2022). Dengan demikian Britania Raya melengkapi responnya terkait invasi Rusia terhadap Ukraina melalui tiga pendekatan diantaranya diplomasi, ekonomi koersif, dan kekuatan militer.

Kebijakan Sanksi Ekonomi Rezim Rusia 2022

Realisasi SAMLA 2018 atau kebijakan sanksi ekonomi yang digagas Britania Raya pada isu yang terjadi antara Rusia – Ukraina, dimulai dengan pembekuan aset. Pada pembekuan aset, Britania Raya melakukan pendataan rezim Rusia terlebih dahulu untuk mengetahui individu-individu mana saja yang memiliki keterkaitan dengan oligarki Rusia. Pendataan ini oleh otoritas Britania Raya disebut dengan tahapan *consolidated list* yang mana nantinya akan ditimbang kembali oleh Pemerintah Britania Raya kesesuaiannya (Government UK 2022). Sesuai dengan pedoman juga, nama-nama yang masuk dalam *consolidated list* akan disebut dengan *designated persons* yang nantinya akan menerima pembekuan aset. Pada tahap ini, Britania Raya telah memasukkan lebih dari 1000 nama yang akan dibekukan asetnya, termasuk juga pemilik perusahaan Evraz PLC, Norilsk Nickel dan juga klub domestik Liga Premier Inggris Chelsea FC.

Otoritas yang memiliki kewenangan akan hal ini adalah The Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI). Tahapan selanjutnya adalah perilsan *e-alerts* pada laman resmi Pemerintah Britania Raya yang berisikan peringatan tertulis untuk segera melakukan pelaporan ataupun banding atas asetnya. Menurut laporan yang dirilis oleh Pemerintah Britania Raya, otoritasnya telah menghitung nilai aset yang dibekukan hingga bulan Maret 2022 mencapai nilai £100 Miliar (Government UK 2022). Apabila menghitung secara

terpisah, Abramovich saja memiliki aset senilai \$3.2 Miliar dengan tiga perusahaan yang beroperasi di Britania Raya. Roman Abramovich menerima sanksi pembekuan aset tercatat pada tanggal 10 Maret 2022, dengan kode "RUS0270 – Individual" pada *consolidated lists* (Government UK 2022).

Masuknya nama Roman Abramovich yang sejatinya bukan anggota Pemerintahan Rusia merupakan indikasi implementasi SAMLA 2018 yang juga mencakup semua individu yang berkaitan dengan oligarki pembuatan kebijakan melanggar hukum. OFSI mengidentifikasi Abramovich sebagai salah satu pendukung kebijakan invasif Kremlin yang ditunjukkan melalui kedekatannya dengan Presiden Vladimir Putin, yang kemudian berujung ke dibekukannya aset-aset yang ada di kawasan Britania Raya. Sesuai dengan indikator yang ada di teori kebijakan sanksi ekonomi, pembekuan aset Abramovich ini berkenaan dengan aktivitas outward FDI dan direct investment abroad oleh warga negara non-Britania Raya. Abramovich diketahui telah memiliki saham mayoritas Chelsea Football Club selama lebih dari 20 tahun terhitung mulai dari 2003 hingga 2022.

Pembekuan Aset Britania Raya kepada Abramovich secara spesifik akan menghentikan segala bentuk transaksi dan tidak dapat mendapatkan benefit apapun dari pendapatan klub (Euronews 2022). Dengan demikian segala bentuk aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan keterkaitan terhadap entitas yang dibekukan asetnya akan berhenti hingga sanksi ekonomi yang menjerat Rusia diangkat (Government UK 2022). Akan tetapi sanksi yang diberikan Britania Raya tidak hanya berhenti di pembekuan aset. Pada tahapan berikutnya Britania Raya juga mengimplementasikan *forced disinvestment* dengan produk kebijakannya yakni *forced sales* dan *assets seizure*.

Sesuai dengan teori sanksi ekonomi yang dikembangkan oleh Ochoa dan Pena (2020), Britania Raya mengimplementasikan penghentian investasi paksa terhadap seluruh entitas Rusia yang memiliki indikasi melakukan pencucian uang untuk Pemerintah Rusia. Pada studi kasus Chelsea FC, pemerintah dengan pembekuan aset mengakibatkan berhentinya segala bentuk kegiatan operasional. Akan tetapi, hal ini menimbulkan kontroversi atas bercampurnya urusan politik dengan aspek olahraga khususnya sepak bola yang telah menjadi budaya di Inggris. Dengan demikian, Britania Raya mengambil alih operasional Chelsea melalui *General licences* yang diturunkan untuk memperbolehkan Chelsea FC melanjutkan kompetisinya namun dengan beberapa syarat (Government UK 2022).

Lisensi operasional tersebut mencakup banyak aspek, diantaranya merupakan larangan-larang atau batasan seperti (1) larangan transfer pemain; (2) pembatasan penonton dan penjualan tiket; (3) operasional pertandingan; (4) penutupan toko resmi klub; dan (5) menyetujui rencana penjualan klub jika diinginkan (Government UK 2022). Langkah Britania Raya ini penulis nilai sesuai dengan teori yang digunakan yakni dengan langkah *occupations* sehingga terdapat intervensi bisnis yang terjadi pada Chelsea FC. *Occupations* ini dilakukan dengan tujuan menghalau segala bentuk sumber pendanaan kepada Abramovich yang masih berstatus pemilik Chelsea FC meskipun telah dibekukan. Akan tetapi, secara rasional batasan-batasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Britania Raya memberikan tekanan yang cukup berat kepada Chelsea FC khususnya pada poin-poin yang menghalau dana masuk yang tidak dapat diketahui juga kapan sanksi tersebut berakhir. Dengan demikian, pada tanggal 2 Maret 2022 hingga 20 Mei 2022 dilakukan penjualan saham keseluruhan Chelsea FC untuk tetap menjaga keberlangsungan klub Chelsea FC (Chelsea Football Club 2022).

Meskipun terjadi penjualan, Britania Raya tetap menjadi pihak yang mengatur proses penjualan agar memastikan Abramovich tidak mengambil keuntungan apapun (Government UK 2022). Penulis beragumen bahwa penjualan yang dilakukan ini masuk ke dalam indikator *forced sales* yang dijalankan oleh Britania Raya yang tetap pada pendirian sanksi

ekonominya. Dengan tetap mengikuti prosedur Britania Raya, Chelsea berhasil dijual kepada grup yang dipimpin oleh Todd Boehly dan Clearlake Capital sebagai pemilik resmi Chelsea FC dengan total pembayaran £4.25 miliar (Chelsea Football Club 2022). Berakhirnya kepemilikan warga negara Rusia yakni Roman Abramovich atas Chelsea FC merupakan titik berakhirnya juga direct abroad investment di Britania Raya khususnya pada sektor olahraga.

Kesimpulan

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina merupakan salah satu contoh peristiwa dengan cakupan yang kompleks yang salah satunya pada aspek ekonomi. Strategi Britania Raya dalam menghalau gerakan invasif Rusia pada peristiwa ini adalah melalui beberapa pendekatan yakni diplomasi, militer dan ekonomi. Pada aspek ekonomi, Britania Raya memiliki prosedurnya sendiri yang memiliki kesinambungan antara cita-cita nasional yakni perdamaian regional. Prosedur yang digunakan Britania Raya pada kasus ini adalah melalui diplomasi koersif. Melalui teori yang disampaikan oleh Perez, Constantinou dan juga Levy didapatkan bahwa Britania Raya melakukan secara runtut prosedur diplomasi koersifnya yang dimulai dari tacit ultimatum yang kemudian berkembang menjadi full fledged ultimatum yang ditunjukkan dengan pidato resmi Perdana Menteri Britania Raya. Selanjutnya, Britania Raya juga memiliki pondasi yang jelas mengenai sanksi ekonomi yang merupakan bentuk nyata dari diplomasi koersif yaitu dengan diresmikan dan digunakannya SAML A 2018. Dengan demikian Britania Raya memiliki aturan yang jelas dan tidak bertumpang-tindih dengan hukum-hukum yang ada di PBB maupun EU.

Setelah penetapan sanksi ekonomi, Britania Raya memiliki prosedur yang lebih kompleks demi terciptanya sanksi ekonomi yang efektif yakni dengan beberapa tahapan, yang pertama adalah pembentukan consolidated list yang berisikan nama-nama designated persons rezim Rusia yang akan dikenai sanksi individual. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kasus Chelsea Football Club, dimana pemiliknya masuk dalam daftar designated persons sanksi ekonomi rezim Rusia. Dalam kasus Chelsea FC, Britania Raya melakukan sanksi yang terbagi menjadi dua jenis yakni assets freezing dan forced disinvestment. Kedua langkah ini sangat relevan dengan teori kedua yang penulis gunakan yakni teori sanksi ekonomi oleh Filipenko dkk. Pembekuan aset dilakukan tepat setelah perilisan nama-nama designated persons dan forced disinvestment diberlakukan dengan strategi yang lebih terstruktur yakni dengan dikeluarkannya kebijakan general licence kepada Chelsea FC yang selanjutnya mengakibatkan tekanan untuk dilanjutkan pada proses penjualan aset sebagai bentuk forced disinvestment entitas Rusia.

Referensi

Buku

- Constantinou, C., Kerr, P., & Sharp, P. (2016). *The SAGE handbook of diplomacy*. London: SAGE Publication.
- Perez. (2015). *Coercive Diplomacy in the 21st Century: A New Framework for the "Carrot and Stick"* [University of Miami].

Artikel Jurnal

- Filipenko, A., Bazhenova, O., & Stakanov, R. (2020). ECONOMIC SANCTIONS: THEORY, POLICY, MECHANISMS. *Baltic Journal Of Economic Studies*, 6(2), 69-80. doi: 10.30525/2256-0742/2020-6-2-69-80

- Jack S. Levy (2008). The Enduring Legacy of Alexander L. George: A Symposium || Deterrence and Coercive Diplomacy: The Contributions of Alexander George. *Political Psychology*, 29(4), 537–552. doi:10.2307/20447143
- Kobayashi, Yoshiharu. (2018). Economic Sanction as Foreign Policy. 10.1093/acrefore/9780190228637.013.477.
- Ochoa, D., & Pena, J. (2020). The Impact of Forced Divestments on Parent Company Stock Prices: Buy on the Rumor, Sell on the News?. *Research In International Business And Finance*, 4-5. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101175>

Situs Resmi

- GOV UK. (2022). Chelsea FC granted licence to continue operating. Retrieved 26 August 2022, from <https://www.gov.uk/government/news/chelsea-fc-granted-licence-to-continue-operating>
- GOV UK. (2022). Fan-Led Review of Football Governance: securing the game's future. Retrieved 26 August 2022, from <https://www.gov.uk/government/publications/fan-led-review-of-football-governance-securing-the-games-future/fan-led-review-of-football-governance-securing-the-games-future#foreword>
- GOV UK. (2022). Russia's aggression towards Ukraine: Foreign Secretary's statement. Retrieved 22 August 2022, from <https://www.gov.uk/government/speeches/ukraine-foreign-secretary-statement>
- GOV UK. (2022). Foreign Secretary imposes UK's most punishing sanctions to inflict maximum and lasting pain on Russia. Retrieved 25 August 2022, from <https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-imposes-uks-most-punishing-sanctions-to-inflict-maximum-and-lasting-pain-on-russia>
- Gov UK. (2022). The UK government's response to the Russian invasion of Ukraine. <https://www.gov.uk/government/topical-events/russian-invasion-of-ukraine-uk-government-response/about> Psaki, J., 2022. Statement from Press Secretary Jen Psaki on Russian Aggression Towards Ukraine. The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/19/statement-from-press-secretary-jen-psaki-on-russian-aggression-towards-ukraine/> diakses pada 24 Maret 2022.
- GOV UK. (2022). UK financial sanctions: General guidance for financial sanctions under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018. Retrieved 22 August 2022, from <https://www.gov.uk/government/publications/ofsi-guidance-html-documents/uk-financial-sanctions-general-guidance-for-financial-sanctions-under-the-sanctions-and-anti-money-laundering-act-2018>
- GOV UK. (2022). We urge Russia to make clear it will stand down its troops: UK statement at UN Security Council. Retrieved 22 August 2022, from <https://www.gov.uk/government/speeches/we-urge-russia-to-make-clear-it-will-stand-down-its-troops>
- Legislation UK. (2018). Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018. Retrieved 22 August 2022, from <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/13/contents/enacted>
- United Kingdom Government, 2022. Prime Minister's address to the nation on the Russian invasion of Ukraine: 24 February 2022. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-address-to-the-nation-on-the-russian-invasion-of-ukraine-24-february-2022> diakses pada 24 Maret 2022.
- United Kingdom Government, 2022. UK sanctions regimes. <<https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-regimes-under-the-sanctions-act>> diakses pada 24 Maret 2022.
- United Kingdom Government, 2022. Foreign Secretary announces historic round of sanctions on Russia. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-announces-historic-round-of-sanctions-15-march-2022> diakses pada 24 Maret 2022.

- United Kingdom Government, 2022. Abramovich and Deripaska among 7 oligarchs targeted in estimated £15 billion sanction hit. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/abramovich-and-deripaska-among-seven-oligarchs-targeted-in-estimated-15bn-sanction-hit> diakses pada 24 Maret 2022.
- United Kingdom HM Treasury. (2022). UK FINANCIAL SANCTIONS: General guidance for financial sanctions under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018. London: Office of Financial Sanction Implementation.
- Office of Financial Sanctions Implementation. (2022). GENERAL LICENCE: Transferable securities, money-market instruments, loans and credit arrangements. HM Treasury.
- Office of Financial Sanctions Implementation. (2022). GENERAL LICENCE – Financial services regarding wind down of derivatives, repurchase, and reverse repurchase transactions with the National Bank of Belarus, and Ministry of Finance of Belarus.. HM Treasury.
- OFSI. (2022). Chelsea Football Club: What you need to know - OFSI. Retrieved 26 August 2022, from <https://ofsi.blog.gov.uk/2022/03/10/chelsea-football-club-what-you-need-to-know/>

Situs Daring

- Bloomberg, 2022. Transcript: Vladimir Putin's Televised Address on Ukraine. [online] Bloomberg.com. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-24/full-transcript-vladimir-putin-s-televised-address-to-russia-on-ukraine-feb-24> diakses pada 20 March 2022.
- Chelsea Football Club. (2022). Statement from the Board of Directors of Chelsea Football Club Limited. Retrieved from <https://www.chelseafc.com/en/news/article/statement-from-board-of-directors-of-chelsea-football-club-limit#:~:text=Roman%20Abramovich%20has%20completed%20the,19%20successful%20years%20of%20ownership>.
- EuroNews. (2022). Roman Abramovich: Chelsea owner latest Russian oligarch sanctioned by UK [TV programme].
- RFE/RL. (2022). British PM Says Europe In Most Serious Security Crisis In Decades Over Ukraine. Retrieved 19 August 2022, from <https://www.rferl.org/a/31695968.html>